

## DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Widjaja. 2006. *Administrasi Kepegawaian*. Rajawali: Bandung.
- Fahmi Amrusi dalam Ni"matull Huda. 2012. *Hukum Pemerintah Daerah*. Nusamedia: Bandung.
- Faisal Tamim. 2005. *Reformasi Birokrai: Analisis Pemberdayaan Aparatur Negara*. Belantika: Jakarta.
- Inu Kencana Syafiie. 2010. *Pengantar ilmu pemerintahan*. Refika Aditama: Jakarta.
- Muchsan. 1982. *Hukum Kepegawaian*. Bina Aksara: Jakarta
- Muh Hasrul. Syafaat Anugrah Pratama. 2019. *Urgensi Staff Ahli*. Litera: Yogyakarta.
- R. Palan. 2007. *Competency Management-A Practicioner's Guide*,  
.(Terjemahan). Organizational Theory. USA: Prentice Hall
- Rozali Abdullah. 2007. *Hukum Kepegawaian*. Rajawali: Jakarta.
- Rosdakarya Musanef. 2007. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Gunung Agung: Jakarta.
- Sarundajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta
- Sastra Djatmika. 2001. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Djembatan: Jakarta.
- Sri Hartini. 2008. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Suharsimi. Chaniago. Muslim. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Thafa Media: Yogyakarta.

Zauhar Soesilo. *Reformasi Administrasi, konsep, dimensi dan strategi*.  
Bumi Aksara: Magelang.

### **Sumber Lain**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara  
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan  
Kompetitif di lingkungan Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai  
Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018  
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian  
Kerja.

Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2020 tentang  
Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka  
dan Kompetitif di lingkungan Instansi Pemerintah dalam kondisi  
ke daruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019  
(COVID-19)

### **Sumber Lain**

La Ode Bariun, 2015, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam  
Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang  
Berkeadilan*. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas  
Hasanuddin. Makassar

Muh. Hasrul, Jurnal Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Volume 22 No. 1 tahun 2017 Edisi Januari.

Setya Nugraha. Maulina. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya

Setya Retnami. 2001, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.

<https://l1dikti2.ristekdikti.go.id/2014/05/02/permenpan-rb-tentang-tata-cara-pengisian-jabatan-pimpinan-tinggi-secara-terbuka.html>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2020.

Pengertian Provinsi dan Kabupaten diakses melalui [www.infomasi ahli.com](http://www.infomasi ahli.com) pada tanggal 18 Februari 2020

Profil Kabupaten Gowa diakses melalui Website resmi Kabupaten Gowa <http://gowakab.go.id/> pada tanggal 18 Februari 2020.